

ABSTRAKSI

Pembangunan merupakan tindakan yang memerlukan perencanaan secara matang, bertahap dan berkesinambungan. Bappenas selaku badan pemerintah yang tugasnya merencanakan dan membangun daerah-daerah secara nasional, tentu tidak akan secara sembarangan melakukan pola pembangunan. Memasuki era otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan tidak lagi dilakukan pemerintah pusat, melainkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, Bappenas membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung kinerja manajemen Bappenas agar lebih terarah dalam melakukan penentuan, pengawasan dan evaluasi pembangunan-pembangunan di daerah menuju tercapainya sistem otonomi daerah yang baik.. Dalam perancangan sistem informasi ini, sistem informasi yang digunakan adalah sistem informasi geografis yang mampu menyimpan data, menganalisis dan menampilkannya dalam visual geografis. Kemampuan sistem informasi geografis yang meliputi data spasial dan non spasial bisa mempermudah manajemen Bappenas dalam mengawasi jalannya otonomi daerah yang berorientasi pemetaan. Sehingga manajemen Bappenas lebih mudah dalam melihat dan menilai perkembangan otonomi di daerah.

Perancangan sistem informasi geografis sistem otonomi daerah ini memerlukan data spasial berupa peta dasar Jawa Barat dan data non spasial dari staff Bappenas berupa jumlah pegawai, jumlah pendapatan daerah, belanja daerah, jumlah instansi, jumlah penduduk dan juga luas wilayah per kabupaten. Output yang diinginkan berupa peta existing Jawa Barat beserta visualisasi wilayah dengan pewarnaan yang berbeda sesuai ranking yang dimiliki kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat. Dengan sistem ini, daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan otonomi daerah atau tidak, akan lebih mudah dikenali dan dipelajari karena sifat sistem informasi geografis yang dapat menampilkan data dalam bentuk peta tematik sesuai kebutuhan. Visualisasi data non spasial (atau bisa juga di sebut data atribut) ini dapat ditampilkan bersama data spasialnya, sehingga pengambilan keputusan manajemen Bappenas pun dapat berlangsung lebih efektif.

Dibandingkan dengan sistem yang lama berupa sistem informasi manajemen, sistem informasi geografis ini terlihat lebih baik dan lebih praktis. Karena outputnya menampilkan peta wilayah otonomi daerah beserta tematiknya dengan pewarnaan sesuai ranking, sehingga manajemen Bappenas dapat lebih terbayang atas wilayah otonomi daerah yang tidak, sedang, dan sudah berkembang dengan baik berdasarkan analisis ruang dan waktu. Dan dapat melihat perkembangannya setiap tahun.

Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis, Bappenas, Otonomi Daerah, Jawa Barat